



Analisis Semiotika Kecurangan Pemilu dalam Film Dokumenter Dirty Vote

Dimas Erdhinta Pratama Putra¹, Anggra Agastyassa Owie², Fatma Retha Hazmy³

^{1,2} Program Studi Film dan televisi, Akademi Film Yogyakarta

³ Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: erdhinta@afy.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 25, 2024

Revised May 29, 2024

Accepted June 12, 2024

Keywords:

Semiotika, Julia Kristeva, Film, Dokumenter, Dirty Vote, dan Pemilu

ABSTRAK

Jika kita menelusik lebih jauh sistem demokrasi di Indonesia masih sangat jauh dari impian, karena jauh dari makna berdemokrasi. Terutama dalam pemilu yang menjadi penentu bagi berlangsungnya demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nyatanya hal ini masih sangat jauh untuk diaplikasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis semiotika Julia Kristeva karena Kristeva memadukan analisis struktural (berfokus pada unsur internal teks) dan analisis kontekstual (mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah). Hal ini relevan dengan "Dirty Vote" karena penting untuk memahami konteks politik dan sosial dalam menyampaikan pesan film tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna genoteks film ini menunjukkan kecurangan pemilu, sedangkan makna fenoteks adalah visual yang dilihat penonton. sementara gagasan abjeksi membantu menjelaskan perasaan yang dimiliki penonton saat melihat foto yang menunjukkan kecurangan pemilu.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 25, 2024

Revised May 29, 2024

Accepted June 12, 2024

Keywords:

Semiotics, Julia Kristeva, Film, Documentary, Dirty Vote, and Election.

ABSTRACT

If we examine further, the democratic system in Indonesia is still very far from the dream, because it is far from the meaning of democracy. Especially in elections which determine the continuation of democracy from the people by the people and for the people. In fact, this is still very far from being implemented. This research uses a descriptive qualitative research method with Julia Kristeva's semiotic analysis because Kristeva combines structural analysis (focusing on the internal elements of the text) and contextual analysis (considering the social, cultural and historical context). This is relevant to "Dirty Vote" because it is important to understand the political and social context in conveying the film's message. The research results show that the meaning of the film's genotext shows election fraud, while the meaning of the phenotext is the visuals seen by the audience. while the idea of abjection helps explain the feelings viewers have when viewing photos showing election fraud.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nama penulis: Dimas Erdhinta Pratama Putra

Akademi Film Yogyakarta

Email: erdhinta@afy.ac.id

Pendahuluan

Indonesia merupakan satu negara yang berasaskan Pancasila dan menganut sistem demokrasi. Dalam menjalankan sistem partai politik yang mengambil peran sebagai penggerak demokrasi seharusnya mampu untuk menjadi wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tercipta masyarakat yang cerdas politik secara fundamental dan perekrutan dalam partai politik akan optimal.

Secara harfiah demokrasi memiliki arti pemerintahan oleh rakyat merupakan pemahaman mendasar dan definisi yang telah digunakan secara luas demokrasi merupakan tidak saja didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak rakyat (Yuliani Widianingsih, 1984).

Jika kita menelisik lebih jauh sistem demokrasi di Indonesia masih sangat jauh dari impian, karena jauh dari makna berdemokrasi. Terutama dalam pemilu yang menjadi penentu bagi berlangsungnya demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nyatanya hal ini masih sangat jauh untuk diaplikasikan. Pemilu melahirkan para koruptor dan nepotisme yang menjadi buntut panjang dari mahalannya mahar politik yang diambil oleh setiap partai yang tentu saja hal ini akan diganti dengan masa periode kepemimpinan setelah wakil partainya mendapatkan kesempatan.

Politik merupakan sebuah wewenang atau sebuah kuasa terhadap proses keputusan yang dilakukan secara kolektif dengan alokasi sebuah sumberdaya yang langka langka (the allocation of scarce resources), politik juga di jelaskan sebagai sebuah sarana untuk merebut kepentingan yang penuh dengan muslihat (Andrew Heywood., 2014).

Politik memuat sebuah aktifitas manusia yang berhubungan dengan orang lain yang muncul karena perbedaan pemikiran berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan yang dapat memicu konflik yang perlu diambil jalan tengah untuk mengambil keputusan. Politik muncul karena sifat dasar manusia yakni nature (sejak lahir) dan nurture (pengalaman social), berkolaborasi dengan akal dan naluri manusia (intellect dan instinct) untuk berkompetisi memenuhi kepentingan masing-masing (competition to cooperation).

Reformasi telah memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan demokrasi dan transformasi sosial di Indonesia. Setiap masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihan dan memiliki kebebasan di tiap individunya. Karena Indonesia merupakan satu negara yang berasaskan Pancasila dan menganut sistem demokrasi. Dalam menjalankan sistem partai politik yang mengambil peran sebagai penggerak demokrasi seharusnya mampu untuk menjadi wakil



rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat agar tercipta masyarakat yang cerdas politik secara fundamental dan perekrutan dalam partai politik akan optimal.

Jika kita menelisik lebih jauh sistem demokrasi di Indonesia masih sangat jauh dari impian, karena jauh dari makna berdemokrasi. Terutama dalam pemilu yang menjadi penentu bagi berlangsungnya demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Nyatanya hal ini masih sangat jauh untuk diaplikasikan.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warganegara. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik langsung atau melalui wakil yang mereka pilih. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.

Elemen-elemen utama dalam demokrasi meliputi pemilihan bebas dan adil dimana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil mereka melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan rahasia. Pemilihan ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan menentukan pemerintahan mereka. Perlindungan HAM dimana demokrasi melindungi hak asasi manusia (HAM) dan mengakui martabat setiap individu.

Ini mencakup kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendirikan organisasi, dan hak-hak lainnya yang penting dalam masyarakat yang demokratis. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan dalam mengekspresikan tindakannya dengan mengikuti hukum dan aturan yang berlaku.

Pembuatan film dokumenter menjadi salah satu sarana media yang efektif dalam menyalurkan pendapat demokratis. Melalui pendekatan visual dan naratif yang kuat, film dokumenter mampu mengangkat isu-isu penting, menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan, serta memberikan perspektif mendalam yang sering kali tidak terjangkau oleh media konvensional. Film dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai alat pengungkapan fakta, tetapi juga sebagai medium edukasi dan advokasi yang mampu menggerakkan perubahan sosial dan politik di masyarakat.

Film "Dirty Vote" yang diproduksi oleh Watchdoc dirilis pada 11 Februari 2024 dengan durasi 1 jam 57 menit 22 detik dan telah ditonton lebih dari 9 juta kali. Disutradarai oleh Dandhy Laksono, film ini melibatkan tiga pakar politik dan hukum, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. Sebagai film dokumenter, "Dirty Vote" mengangkat isu kecurangan pemilu yang kerap menjadi masalah serius dalam sistem demokrasi, menyajikan kesaksian dan bukti dari berbagai pihak yang terlibat.

"Dirty Vote" mengungkapkan bagaimana kepercayaan publik terhadap proses demokrasi rusak akibat kecurangan pemilu. Film ini menampilkan berbagai desain kecurangan, seperti inkompetensi Bawaslu dan KPU dalam menegakkan hukum, politisasi bantuan sosial, intimidasi pemilih, hingga penyalahgunaan kekuasaan oleh para menteri. Dengan struktur naratif yang kronologis dan tematik, film ini mengungkapkan alur cerita dimulai dari



pengenalan konteks politik dan sosial. Cuplikan berita dan bukti-bukti kecurangan pemilu disorot di setiap segmen film.

Menurut Nichols (2017), film dokumenter merupakan jenis film yang menjelaskan suatu fenomena tanpa rekayasa, disusun berdasarkan fakta dan keadaan saat itu, bukan berdasarkan urutan waktu atau kondisi yang diatur. Film dokumenter dinilai efektif untuk mengangkat topik kecurangan pemilu, seperti yang ditampilkan dalam "Dirty Vote", karena kemampuannya menggabungkan visualisasi dan narasi yang kuat untuk mengungkap fakta-fakta kompleks secara langsung kepada penonton. Dengan menyajikan bukti visual, wawancara dengan saksi mata, dan rekaman kejadian nyata, film dokumenter tidak hanya mempermudah pemahaman isu kecurangan pemilu, tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang mendalam, memperkuat pengaruh dan daya jangkau pesan yang disampaikan. Distribusi yang luas melalui berbagai platform semakin memperkuat efektivitasnya dalam menyebarkan informasi penting dan mempengaruhi opini publik.

Berbagai kecurangan pemilu yang terjadi mendorong masyarakat untuk menuntut pengembalian sistem demokrasi Indonesia ke jalur yang benar. Salah satu bentuk gerakan tersebut adalah hadirnya film dokumenter "Dirty Vote" yang dapat dijadikan panduan dalam mempertimbangkan penggunaan hak pilih atau sekadar sebagai sumber informasi terkait keadaan demokrasi di Indonesia saat ini. Peneliti melihat bahwa film ini sengaja dirancang untuk memberikan pengaruh besar kepada masyarakat terkait pemilu, sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Dengan menggunakan teori semiotika Julia Kristeva yang menganalisis genoteks, fenoteks, abjeksi, hingga intertekstualitas dalam penerapan pemaknaan teks film, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pesan yang merepresentasikan bentuk-bentuk kecurangan dalam pemilu.

Metode

Secara umum, langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam melakukan penelitian yakni dilakukan dengan mengumpulkan data yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis isi.

Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sebuah kejadian peristiwa yang sedang terjadi. Pada pendeskripsian penelitian perlu diseimbangkan dengan adanya analisis kemudian diinterpretasikan pada hasil temuan di penelitian. Pada deskripsi ini bertujuan untuk membantu pembaca mengetahui sesuatu yang terjadi di lingkungan berdasarkan pengamatan dari peneliti dielaborasi dengan pandangan dari para partisipan dalam penelitian.

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah dalam sebuah pengumpulan data. Pada konteks "metode ilmiah" diartikan sebagai kegiatan penelitian yang mengacu pada ciri ilmiah yang rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis semiotika Julia Kristeva karena Kristeva memadukan analisis struktural (berfokus pada unsur internal teks) dan analisis kontekstual (mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah). Hal ini relevan dengan "Dirty Vote"



karena penting untuk memahami konteks politik dan sosial dalam menyampaikan pesan film tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana film mencerminkan dan mempengaruhi konteks sosiopolitik yang lebih luas.

Pendekatan terhadap semiotika Julia Kristeva menekankan analisis mendalam terhadap teks dan media melalui beberapa konsep utama yang menggali aspek-aspek tersembunyi dan kompleks dari makna. Konsep-konsep ini mencakup genoteks, fenoteks, abjeksi, dan intertekstualitas, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap teks atau media. Genoteks merujuk pada elemen-elemen mendasar dari teks yang mencakup aspek non-linguistik seperti ritme dan struktur psikis, sementara fenoteks adalah aspek permukaan teks yang mencakup struktur linguistik yang jelas. Konsep abjeksi menggambarkan reaksi penolakan atau ketidaknyamanan terhadap sesuatu yang dianggap menjijikkan atau mengancam identitas, dan intertekstualitas menekankan bahwa makna sebuah teks dibentuk oleh hubungannya dengan teks lain.

Menggabungkan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan semiotika Julia Kristeva memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap fenomena sosial atau media. Pendekatan kualitatif deskriptif menyediakan kerangka untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara kontekstual dan induktif, sementara konsep-konsep semiotika Kristeva memberikan alat analitis untuk mengeksplorasi berbagai lapisan makna dalam teks atau media. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam elemen genoteks dan fenoteks, memahami reaksi emosional melalui abjeksi, serta mengeksplorasi hubungan intertekstual yang merepresentasikan kecurangan pemilu dalam film "Dirty Vote".

Hasil

Sekilas Tentang Film "Dirty Vote"

Film "Dirty Vote" adalah dokumenter politik yang penuh intrik dan ketegangan, menggambarkan kecurangan dalam pemilihan umum. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang calon politik yang berusaha memenangkan pemilu, namun harus menghadapi berbagai rintangan dan taktik kotor dari lawan politiknya. Film ini mengeksplorasi bagaimana kekuasaan dapat mengubah seseorang dan seringkali mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi. Setiap adegan menggambarkan dinamika kekuasaan dan ambisi tak terbatas, mempertanyakan moralitas dan etika dalam politik modern.

Selain itu, "Dirty Vote" menyoroti peran media massa dalam mempengaruhi opini publik. Film ini menunjukkan bagaimana media dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil pemilu. Media massa digambarkan sebagai alat yang mudah dimanipulasi untuk kepentingan politik, menambah kompleksitas dalam pertarungan politik yang dipenuhi intrik dan pengkhianatan. Dengan sinematografi mendalam dan narasi kuat, "Dirty Vote" tidak hanya menghibur tetapi juga

mengajak penonton untuk merenungkan dampak negatif dari manipulasi informasi dalam sistem politik demokratis.

Secara keseluruhan, "Dirty Vote" bukan sekadar film dokumenter politik biasa, tetapi juga kritik tajam terhadap moralitas dan etika politik, serta peringatan akan bahaya kecurangan dalam pemilu. Film ini menggambarkan kerentanan demokrasi terhadap praktik kecurangan dan manipulasi, dan mengajak penonton untuk mempertimbangkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam memilih pemimpin. Dengan tema yang relevan dalam konteks politik global saat ini, "Dirty Vote" menyampaikan pesan moral mendalam tentang tanggung jawab kita sebagai warga untuk menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan.

Pembahasan

Identifikasi Genoteks dan Fenoteks

Teori Semanalisis adalah pendekatan terhadap bahasa sebagai suatu proses penandaan (signifying process) yang heterogen dan berpusat pada subjek-subjek yang berbicara. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi genoteks dan fenoteks dalam film "Dirty Vote". Genoteks merujuk pada dimensi mendasar dan tersembunyi dari teks, mencakup struktur ideologis, tema-tema mendalam, dan makna-makna yang tidak langsung terlihat. Fenoteks, sebaliknya, adalah lapisan permukaan teks yang terlihat dan mudah diakses oleh penonton, termasuk elemen-elemen visual, narasi, dialog, dan data yang disajikan secara eksplisit.

Dalam konteks film "Dirty Vote", genoteks adalah makna yang ingin disampaikan oleh pembuat film, seperti makna integritas dan keadilan yang ditunjukkan pada adegan tertentu.



Gambar 1. Sikap Bawaslu dan KPU tidak profesional
(Screenshot YouTube PSHK Indonesia)

Gambar 1 yang berdurasi 57:27 - 1:00:51 menunjukkan ketidakprofesionalan Bawaslu dan KPU dalam menegakkan pelanggaran pemilu setelah mengetahui adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden dan beberapa menteri yang secara terbuka melakukan kampanye dan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon tertentu tanpa cuti. Kasus lainnya adalah

penggunaan akun X kementerian pertahanan untuk kampanye, yang jelas-jelas digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan lembaga. Dalam kedua kasus tersebut, Bawaslu menunjukkan sikap inkompeten dengan hanya memberikan teguran, padahal seharusnya tindakan tersebut dikenakan sanksi agar memberikan efek jera dan tidak terulang lagi.



Gambar 2. KPU meloloskan partai yang tidak sesuai ketentuan (Screenshot You Tube PSHK Indonesia)

Gambar 2 berlangsung dari 1:06:53 hingga 1:07:20, menunjukkan bahwa KPU melanggar undang-undang dengan meloloskan partai yang tidak memenuhi syarat. contoh kasus Partai Gelora, yang berhasil menjadi peserta pemilihan, tetapi ada banyak kejanggalan dalam praktik. Secara keseluruhan, Partai Gelora tidak memenuhi syarat, terutama untuk persyaratan seribu anggota di Kabupaten Murung Raya; dari 114 Kartu Tanda Anggota yang diuji, Partai Gelora hanya memenuhi 85 orang yang terverifikasi, menurut dokumen Berita Acara KPUD Murung Raya di Kalimantan Tengah. Namun, partai ini masih dinyatakan lolos.

Dua potongan adegan tersebut menunjukkan betapa proses pemilihan mereka menimbulkan keraguan publik. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu dan KPU harus bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu non-partisan (bersifat mandiri).

Makna Kritik Terhadap Kekacauan Sistem Politik



Gambar 3. Politisasi bansos untuk kepentingan pemilu (Screenshot YouTube PSHK Indonesia)



Gambar 3, yang berlangsung dari 41:46 hingga 43:42, menunjukkan politisasi bansos untuk kepentingan pemilu. Dalam sebuah pemberitaan, disebutkan bahwa aparat gubernur mendorong pemilihan calon presiden yang akan mengikuti Jokowi. Politik gentong babi atau politik pork barrel menjelaskan bagaimana bansos digunakan sebagai alat berpolitik. Istilah ini mengacu pada periode perbudakan di Amerika Serikat yang memiliki reputasi yang jauh lebih buruk daripada perbudakan itu sendiri. Pada saat itu, para budak harus berlomba-lomba untuk mengambil daging babi yang telah disimpan di dalam gentong. Mereka berlomba-lomba, dan akhirnya muncul istilah bahwa ada orang yang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan suatu jatah untuk kenyamanan mereka sendiri. Ini adalah pendekatan politik di mana politisi menggunakan uang negara untuk memenangkan pemilihan di daerah mereka.

Potongan adegan tersebut mengandung makna kritik terhadap kekacauan sistem politik karena menunjukkan bagaimana kepercayaan publik terhadap sistem politik runtuh ketika pemilu, yang seharusnya menunjukkan kehendak rakyat, dimanipulasi melalui strategi kotor dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. menunjukkan efek buruk korupsi politik, di mana intrik dan konspirasi menggantikan integritas dan transparansi yang penting untuk demokrasi. Kritik ini menekankan bahwa reformasi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga proses pemilihan umum tetap jujur. Ini akan memungkinkan demokrasi untuk beroperasi sesuai dengan dasar-dasarnya dan membantu masyarakat luas, bukan hanya mereka yang berkuasa.

Penonton melihat kumpulan sampel makna-makna (genoteks) tersebut sebagai sebuah film. Fenoteks film "Dirty Vote" adalah visual yang ditampilkan kepada penonton; oleh karena itu, fenoteksnya terdiri dari data visual dan grafik.



Gambar 4. Grafik data pemecahan Papua menjadi 6 provinsi (Screenshot YouTube PSHK Indonesia)



Gambar 5. Grafik data menunjukkan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati dipilih Presiden (Screenshot YouTube PSHK Indonesia)

Informasi statistik tentang kecurangan pemilu disajikan dalam sampel cuplikan tersebut, yang termasuk fenoteks. Selain mendukung narasi film, grafik data membantu penonton memahami kompleksitas data yang disajikan. Misalnya, grafik yang menunjukkan pemecahan wilayah Papua yang mencurigakan dan penunjukan PJ sebagai gubernur dan walikota yang tidak menyenangkan berfungsi sebagai alat visual yang efektif untuk mendukung tuduhan film tentang kecurangan pemilu. Dengan memberikan data yang mudah dipahami dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang luas dan efek kecurangan pemilu, fenoteks ini sangat membantu memperkuat kredibilitas film dokumenter.

Analisa Abjeksi Dalam Film

Julia Kristeva mengatakan abjeksi merujuk pada perasaan takjub dan tidak nyaman yang muncul saat berhadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Konsep ini memiliki implikasi yang dapat dilihat pada



Gambar 6. Presiden tidak konsisten dengan ucapannya (iScreenshot YouTube PSHK Indonesia)



Gambar 6 menunjukkan ketidakkonsistenan kepemimpinan dalam film "Dirty Vote", yang menimbulkan kebingungan dan reaksi emosional dari penonton dari 2:46 hingga 6:08. Menurut Julia Kristeva, konsep abjeksi mengacu pada reaksi emosional yang ditunjukkan oleh manusia terhadap hal-hal yang dianggap menjijikkan atau tidak sesuai dengan identitas mereka. Ketika seorang pemimpin bertindak tidak konsisten, seperti dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan tindakan yang sebenarnya dilakukan, hal ini dapat menyebabkan orang marah, jijik, atau bahkan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Dalam "Dirty Vote", situasi di mana seorang pemimpin mengubah pendirian atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat menyebabkan abjeksi. Penonton mungkin merasa terkianati karena harapan mereka terhadap kepemimpinan yang konsisten dan jujur terganggu. Selain rasa tidak puas terhadap pemimpin, mereka juga merasa dipermainkan atau dimanipulasi oleh orang yang seharusnya mereka percayai.

Selain itu, ketidaksepakatan kepemimpinan dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dalam politik. Jika ada ketidaksesuaian antara tindakan dan kata-kata, itu dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik serta menimbulkan ancaman bagi stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, film seperti "Dirty Vote" tidak hanya mengungkapkan praktik kecurangan pemilu, tetapi juga mengajak penonton untuk mempertimbangkan pentingnya konsistensi dan integritas untuk membangun sistem politik yang berkeadilan dan dapat diandalkan.

Kesimpulan

Studi ini menggunakan analisis semiotika Julia Kristeva untuk memahami makna film dokumenter "Dirty Vote", yang mengangkat masalah kecurangan dalam pemilu. Penelitian ini menemukan bahwa makna di balik "Dirty Vote" berubah sesuai dengan pandangan dan pengalaman penonton karena film menggunakan gambar sebagai cara untuk menyampaikan pesan. Analisis genoteks dan fenoteks menunjukkan bagaimana elemen-elemen utama dan struktur naratif film membentuk pesan keseluruhan. Genoteks memberikan fondasi bagi makna yang lebih dalam, sementara fenoteks membantu penonton menghubungkan gambar-gambar dengan kecurangan pemilu dan intrik politik. Konsep abjeksi membantu memahami reaksi emosi penonton terhadap foto yang menunjukkan kecurangan politik dan kecurangan pemilu. Ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik-praktik yang merusak integritas proses demokrasi menunjukkan rasa marah dan ketidaknyamanan yang muncul. Interteks dalam Film ini berhasil meningkatkan kesadaran dan refleksi kritis tentang kecurangan pemilu, korupsi politik, dan dampak kecurangan tersebut terhadap demokrasi. Selain itu, film ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas proses politik dan pemilu.



Daftar Pustaka

Andrew Heywood, Politik (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014).h,52.

Aufderheide, P. (2007). Documentary film : a very short introduction. Oxford University Press, Inc.

Abdullah, S. N. (2020). Analisis Semiotika Julia Kristeva Dalam film “Sexy killers” (Pendekatan Semanalisis Hingga Intertekstualitas. AL-WARDAH, 13(2), 255. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i2.216>

Nathaniella, A., & Triadi, I. (2024). Pengaruh film Dokumenter “dirty vote” Pada Saat Masa tenang Pemilihan Umum tahun 2024 di Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2402>

Singh, A., & Pandey, R. (2024). Julia Kristeva. Philosophy. <https://doi.org/10.1093/obo/9780195396577-0440>

Astuti, S. Y., & W., Y. K. (2023). Makna representamen Kendaraan Pada film ANIMASI anak car toons compilation: Kajian Semiotika C.S. peirce. SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik, 24(1), 72. <https://doi.org/10.19184/semiotika.v24i1.36442>

Salma. (2024, February 19). UGM law expert dr. Zainal Arifin responds to controversy over “dirty vote” documentary. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/en/news/ugm-law-expert-dr-zainal-arifin-responds-to-controversy-over-dirty-vote-documentary/>

“dirty vote” documentary on alleged election fraud goes viral in Indonesia. Global Voices Advox. (2024, February 17). <https://advox.globalvoices.org/2024/02/17/dirty-vote-documentary-on-alleged-election-fraud-goes-viral-in-indonesia/>

The Jakarta Post. (n.d.). “dirty vote” documentary claims Jokowi improperly backed election frontrunner - politics. <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/02/12/dirty-vote-documentary-claims-jokowi-improperly-backed-election-frontrunner.html>

Fadlillah, N., & Mahfudh, H. (2019). Kajian Struktural-Semiotik Ian Richard Netton terhadap Q.S. Al-Kahf. Mutawatir, 9(2), 303–322. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2019.9.2.303-322>

Nichols, B. (2017). Introduction to Documentary, Third Edition. In Bloomington (Ed.), Indiana University Press. Indiana University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2005t6j>

Panjaitan, R. G. P., Wahyuni, E. S., & Mega, M. (2019). Film dokumenter sebagai media pembelajaran submateri zat aditif. JP BIO (Jurnal Pendidikan Biologi), 4(2), 52–59. <https://doi.org/10.31932/jpbio.v4i2.454>

Sjoraida, D. F., Guna, B. W. K., & Yudhakusuma, D. (2024). Analisis Sentimen Film Dirty Vote Menggunakan BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). Jurnal JTIC (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi), 8(2), 393–404. <https://doi.org/10.35870/jtik.v8i2.1580>



Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), cetakan ke (Bandung: ALFABETA, 2015)h.3.

Yuliani Widianingsih, Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia. Liphart, Arend, Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries (New Haven: Yale University Press, 1984).